ABSTRAK

Akbar Bunga Amelya, NIM. 126103202094, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus Aksi Vandalisme Benda Cagar Budaya Pada Arca Dwarapala**)**, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2024, Pembimbing: Yusron Munawir, S.H.I., M.H

Kata Kunci: Implementasi peraturan daerah, Cagar Budaya, Aksi vandalisme

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya aksi vandalisme pada salah satu Arca Dwarapala di sisi selatan Kabupaten Tulungagung yakni di Kelurahan Tamanan. Aksi vandalisme merupakan segala bentuk perbuatan yang merusak (menghancurkan, membuat cacat, dan mencorat-coret) suatu karya atau properti milik pribadi atau umum tanpa ijin dari pemilik. Aksi vandalisme yang terjadi pada Arca Dwarapala di Kelurahan Tamanan, Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan sengaja berupa coretan cat guna mewarnai benda cagar budaya tersebut, tentu hal ini sangat merugikan bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya. Sehingga dengan adanya kasus tersebut peneliti hendak melakukan penelitian terkait implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan cagar budaya daerah oleh pemerintah daerah terhadap aksi vandalisme benda cagar budaya.

Rumusan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tulungagung terhadap aksi vandalisme benda cagar budaya pada Arca Dwarapala? 2) Bagaimana penegakan hukum dalam menangani pelanggaran aksi Vandalisme terhadap Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung?

Tujuan dari penelitian ini yakni: 1) Untuk mengetahui dan meneliti peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Cagar budaya di Kabupaten Tulungagung terhadap aksi vandalisme benda Cagar budaya pada Arca Dwarapala 2) Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana kendala dan penegakan hukum Pemerintah Daerah dalam menangani pelanggaran aksi vandalisme Terhadap Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun teknik pengumpulan datanya yaknj dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan ketekunan penelitian dan triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Cagar Budaya di Kabupaten Tulungagung terhadap aksi vandalisme Benda Cagar Budaya pada Arca Dwarapala adalah, a) Melaporkan kejadian aksi vandalisme kepada Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur yakni pada Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI (BPK Wilayah Jawa Timur), b) Melakukan penanganan tindakan pertama di tempat kejadian perkara bersama

Bhabinkamtipmas Kelurahan Tamanan Polsek Kota yang bertempat di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Tulungagung, c) Pengawalan kasus vandalisme dalam proses penyidikan dari Unit Satuan Reserse Kriminal Khusus Polres Kabupaten Tulungagung di kantor Polres Kabupaten Tulungagung, d) Memberikan perlindungan kepada Arca Dwarapala yang terkena vandalisme berupa Penyelamatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan untuk mencegah adanya kerusakan lanjutan. Dalam melaksanakan perannya Disbudpar memiliki beberapa kendala diantaranya yakni tidak adanya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan Cagar Budaya yakni seperti arkeolog maupun penyidik. Sehingga pengelolaan Cagar Budaya terhadap aksi vandalisme terhambat dan kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun catnya telah perlahan pudar dengan sendirinya karena telah lewat satu tahun kejadian perkara, akan tetapi hingga saat ini belum terdapat penanggulangan menyeluruh dan bentuk pengamanan mengenai Arca Dwarapala yang mengalami vandalisme di Kelurahan Tamanan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung. Hal ini dikarenakan belum adanya arahan apapun dari pihak Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI mengenai penanggulangan kerusakan pada Arca Dwarapala yang mengalami vandalisme di Kelurahan Tamanan, Kabupaten Tulungagung. 2) Penegakan hukum dalam menangani pelanggaran aksi vandalisme terhadap Arca Dwarapala di Kabupaten Tulungagung terjadi melalui empat tahap yakni, a) Pengaduan Jupel Arca Dwarapala Kelurahan Tamanan ke Bhabinkamtipmas Kelurahan Tamanan Polsek Kota, b) Proses penanganan tindakan pertama di tempat kejadian perkara bersama Bhabinkamtipmas Kelurahan Tamanan yang bertempat di kantor di kantor Disbudpar, c) Proses penyelidikan dan penyidikan bersama di kantor Polres, d) Penyelesaian perkara dengan Keadilan Restorative. Terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian kasus vandalisme Arca Dwarapala dengan Keadilan Restoratif, yakni tidak adanya tindak lanjut penyelidikan maupun penyidikan mengenai atasan (bos) pelaku, terdapat kontradiktif mengenai pernyataan pihak kepolisian dan kenyataan di lapangan terhadap penyelesaian aksi vandalisme Arca Dwarapala di Kelurahan Tamanan secara Keadilan Restorative, tidak hadirnya pelaku dalam proses penyelidikan dan penyidikan, serta belum terpenuhinya syarat formil dalam penyelesaian kasus melalui Keadilan Restorative. Selain itu terdapat kekosongan hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah, hal ini dikarenakan tidak diaturnya ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap kerusakan Cagar Budaya dalam peraturan daerah tersebut. Kekosongan hukum selanjutnya terdapat pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 15 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Daerah, hal ini dikarenakan tidak diaturnya peran pemerintah dan /atau pemerintah daerah dalam pengawalan kasus pelanggaran hukum pada tindak lanjut penegakan hukum mengenai kerusakan Cagar Budaya. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum terhadap aksi vandalisme Arca Dwarapala di Kelurahan Tamanan, Kabupaten Tulungagung.

ABSTRACT

Akbar Bunga Amelya, NIM. 126103202094, Implementation of Regional Regulation Number 15 of 2011 concerning Management of Regional Cultural Heritage by the Regional Government of Tulungagung Regency (Case Study of Vandalism of Cultural Heritage Objects on Dwarapala Statues),, Constitutional Law Study Program, Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung 2024, Supervisor: Yusron Munawir, S.H.I., M.H

Keywords : Implementation of regional regulations, Cultural Heritage, acts of vandalism

This research was motivated by an act of vandalism at one of the Dwarapala statues on the southern side of Tulungagung Regency, namely in Tamanan Village. Vandalism is any form of action that damages (destroys, deforms, and scribbles) a work or private or public property without permission from the owner. The act of vandalism that occurred at the Dwarapala Statue in Tamanan Village, Tulungagung Regency was carried out deliberately in the form of paint strokes to color the cultural heritage object, of course this is very detrimental to the government and other communities. So, with this case, researchers want to conduct research related to the implementation of regional regulations regarding the management of regional cultural heritage by the regional government regarding acts of vandalism of cultural heritage objects.

The problem formulation used in this research is: 1) What is the role of the regional government in managing cultural heritage in Tulungagung Regency regarding vandalism of cultural heritage objects at the Dwarapala Statue? 2) How does law enforcement handle violations of vandalism against the Dwarapala Statue in Tulungagung Regency?

The aims of this research are: 1) To find out and examine the role of regional government in managing cultural heritage in Tulungagung Regency regarding vandalism of cultural heritage objects at the Dwarapala statue. 2) To find out and research the obstacles and law enforcement of the Regional Government in handling violations of vandalism against Dwarapala statue in Tulungagung Regency

The research method used in this research is empirical juridical legal research using a statutory approach and a case approach. The data collection techniques are interviews, observation and documentation. Checking the validity of the data used is by using research diligence and data triangulation.

The results of the research show that: 1) The role of the Regional Government in managing Cultural Heritage in Tulungagung Regency regarding vandalism of Cultural Heritage Objects at the Dwarapala Arc is, a) Reporting incidents of vandalism to the Ministry of Education and Culture of East Java

Province, namely to the Region XI Cultural Preservation Agency (East Java Regional BPK), b) Carrying out first actions at the scene of the crime together with Bhabinkamtipmas, Tamanan Subdistrict, City Police located at the Tulungagung Regency Culture and Tourism Service (Disbudpar) office, c) Escorting vandalism cases in the investigation process from the Special Criminal Investigation Unit Tulungagung Regency Police at the Tulungagung Regency Police office, d) Providing protection to the Dwarapala Statue affected by vandalism in the form of Rescue, Security and Maintenance to prevent further damage. In carrying out its role, the Disbudpar has several obstacles, including the absence of qualified human resources in managing cultural heritage, namely archaeologists and investigators. So that the management of Cultural Heritage against acts of vandalism is hampered and does not comply with statutory regulations. Even though the paint has slowly faded by itself because one year has passed since the incident occurred, to date there has been no comprehensive response and form of security regarding the Dwarapala statue which was vandalized in Tamanan Village by the Tulungagung Regency Culture and Tourism Office. This is because there has not been any direction from the Region XI Cultural Preservation Agency regarding dealing with damage to the Dwarapala Statue which was vandalized in Tamanan Village, Tulungagung Regency. 2) Law enforcement in handling violations of vandalism against the Dwarapala Statue in Tulungagung Regency occurs through four stages, namely, a) Complaint against the Jupel Dwarapala Arca, Tamanan Subdistrict to Bhabinkamtipmas, Tamanan Subdistrict, City Police, b) The process of handling the first action at the scene of the crime with Bhabinkamtipmas, Tamanan Subdistrict which takes place in the office at the Disbudpar office, c) Joint inquiry and investigation process at the Police office, d) Settlement of cases with Restorative Justice. There are several obstacles in resolving the Arca Dwarapala vandalism case with Restorative Justice, namely there is no follow-up investigation or investigation regarding the perpetrator's boss, there are contradictions regarding the police's statements and the reality on the ground regarding the resolution of the Arca Dwarapala vandalism in Tamanan Village using Restorative Justice. , the absence of the perpetrator in the inquiry and investigation process, as well as the failure to fulfill formal requirements for resolving cases through Restorative Justice. Apart from that, there is a legal vacuum in Tulungagung Regency Regional Regulation No. 15 of 2011 concerning Management of Regional Cultural Heritage, this is because the criminal provisions regarding violations of damage to Cultural Heritage are not regulated in these regional regulations. The next legal vacuum is found in Law no. 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and Regional Regulations of Tulungagung Regency No. 15 of 2011 concerning Management of Regional Cultural Heritage, this is because the role of the government and/or regional governments in monitoring cases of law violations in follow-up law enforcement regarding damage to Cultural Heritage is not regulated. So this shows that law enforcement is still weak regarding the vandalism of the Dwarapala Arc in Tamanan Village, Tulungagung Regency.

خلاصة

أكبر بونجا أمليا، الرقم الجامعي 126103202094، تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم 15 لعام 2011 بشأن إدارة التراث الثقافي الإقليمي من قبل الحكومة الإقليمية لإقليم تولونج أجونج (دراسة حالة عن تخريب قطع التراث الثقافي على تمثال دوارابالا)، قسم القانون الدستوري بجامعة سيد علي‌الإسلامية الحكومية تولونج أجونج 2024، :تحت إشراف يسرا منور، .S.H.I., M.H

الكلمات المفتاحية: تنفيذ اللوائح الإقليمية، التراث الثقافي، أعمال التخريب

،كان الدافع وراء هذا البحث هو عمل تخريبي وقع على أحد تماثيل دوارابالا على الجانب الجنوبي من منطقة تولونج أجونج وبالتحديد في قرية تامانان. التخريب هو أي شكل من أشكال العمل الذي يلحق الضرر (يدمر ويشوه ويخربش) عملاً أو ملكية خاصة أو عامة دون إذن من المالك. تم تنفيذ عملية التخريب التي حدثت في تمثال دوارابالا في قرية تامانان، مقاطعة تولونجاجونج عمدًا في شكل ضربات طلاء لتلوين قطعة التراث الثقافي، وهذا بالطبع ضار جدًا بالحكومة والمجتمعات الأخرى. لذلك، في هذه الحالة، يرغب الباحثون في إجراء بحث يتعلق بتنفيذ اللوائح الإقليمية المتعلقة بإدارة التراث الثقافي الإقليمي من قبل الحكومة الإقليمية .فيما يتعلق بأعمال تخريب قطع التراث الثقافي

صياغة المشكلة المستخدمة في هذا البحث هي: 1) ما هو دور الحكومة الإقليمية في إدارة التراث الثقافي في مقاطعة تولونج أجونج فيما يتعلق بتخريب قطع التراث الثقافي في تمثال دوارابالا؟ 2) كيف تتعامل سلطات إنفاذ القانون مع انتهاكات التخريب ضد تمثال دوارابالا في منطقة تولونج أجونج؟

أهداف هذا البحث هي: 1) اكتشاف ودراسة دور الحكومة الإقليمية في إدارة التراث الثقافي في مقاطعة تولونجاجونج فيما يتعلق بتخريب قطع التراث الثقافي في تمثال دوارابالا. 2) اكتشاف وبحث العقبات وإنفاذ القانون الحكومة الإقليمية في التعامل مع انتهاكات التخريب ضد تمثال دوارابالا في منطقة تولونجاجونج

.طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي البحث القانوني القانوني التجريبي باستخدام المنهج القانوني ومنهج القضية تقنيات جمع البيانات هي المقابلات والملاحظة والتوثيق. يتم التحقق من صحة البيانات المستخدمة باستخدام الاجتهاد البحثي وتثليث .البيانات

تظهر نتائج البحث ما يلي: 1) دور الحكومة الإقليمية في إدارة التراث الثقافي في مقاطعة تولونجاجونج فيما يتعلق بتخريب قطع التراث الثقافي في قوس دوارابالا هو، أ) الإبلاغ عن حوادث التخريب إلى وزارة التعليم والثقافة في الشرق مقاطعة جاوة، وبالتحديد وكالة الحفاظ على الثقافة بالمنطقة الحادية عشرة (إقليم جاوة الشرقية)، ب) تنفيذ الإجراءات الأولى في مسرح الجريمة بالتعاون مع (بهابينكامتيبماس، منطقة تامانان الفرعية، شرطة المدينة الموجودة في دائرة الثقافة والسياحة في منطقة تولونجاجونج (ديسبودبار) المكتب، ج) مرافقة حالات التخريب في عملية التحقيق من وحدة التحقيقات الجنائية الخاصة بشرطة ريجنسي تولونج أجونج في مكتب شرطة ريجنسي تولونج أجونج، د) توفير الحماية لتمثال دوارابالا المتضرر من التخريب في شكل إنقاذ وأمن وصيانة لمنع مزيد من الضرر. وتواجه الديسبودبار في قيامها بدورها عدة عوائق، من بينها غياب الموارد البشرية المؤهلة في إدارة التراث الثقافي، لا سيما علماء الآثار والمحققين. بحيث يتم إعاقة إدارة التراث الثقافي ضد أعمال التخريب ولا تمتثل للوائح القانونية. على الرغم من أن الطلاء قد تلاشى ببطء من تلقاء نفسه بسبب مرور عام على وقوع الحادث، إلا أنه حتى الآن لم يكن هناك استجابة شاملة وشكل من .أشكال الأمن فيما يتعلق بتمثال دوارابالا الذي تم تخريبه في قرية تامانان من قبل مكتب الثقافة والسياحة في منطقة تولونجاجونج وذلك لأنه لم يكن هناك أي توجيه من وكالة الحفاظ على الثقافة بالمنطقة الحادية عشرة فيما يتعلق بالتعامل مع الأضرار التي لحقت بتمثال دوارابالا الذي تم تخريبه في قرية تامانان، مقاطعة تولونجاجونج. 2) يتم إنفاذ القانون في التعامل مع انتهاكات التخريب ضد

تمثال دوارابالا في منطقة تولونجاجونج من خلال أربع مراحل، وهي: أ) شكوى ضد جوبل دوارابالا أركا، منطقة تامانان الفرعية إلى بابينكامتيبماس، منطقة تامانان الفرعية، شرطة المدينة، ب) عملية التعامل مع الانتهاكات الإجراء الأول في مسرح الجريمة مع بهابينكامتيماس، منطقة تامانان الفرعية والذي يتم في مكتب مكتب ديسبودبار، ج) عملية التحقيق والتحقيق المشتركة في مكتب الشرطة، د) تسوية القضايا مع العدالة التصالحية. هناك عدة عقبات أمام حل قضية التخريب في مع العدالة التصالحية، وهي عدم وجود متابعة أو تحقيق بشأن رئيس الجاني، وهناك تناقضات فيما يتعلق بتصريحات الشرطة والواقع على الأرض فيما يتعلق بحل التخريب في قرية تمنان باستخدام العدالة التصالحية، وغياب مرتكب الجريمة عن عملية التحقيق والتحقيق، فضلاً عن عدم استيفاء المتطلبات الرسمية لحل القضايا من خلال العدالة التصالحية. وبصرف النظر عن ذلك، هناك فراغ قانوني في اللائحة الإقليمية لمنطقة تولونجاجونج رقم 11. وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن إدارة التراث الثقافي الإقليمي، وذلك لأن الأحكام الجنائية المتعلقة بانتهاكات الإضرار بالتراث الثقافي لا يتم تنظيمها في هذه اللوائح الإقليمية. الفراغ القانوني التالي نجده في القانون رقم. قانون رقم 11 لسنة بشأن التراث الثقافي واللوائح الإقليمية لمنطقة تولونج أجونج رقم 11 القانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن إدارة التراث الثقافي 2010 الإقليمي، وذلك لأن دور الحكومة و/أو الحكومات الإقليمية في مراقبة حالات انتهاكات القانون في متابعة إنفاذ القانون فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي غير منظم. وهذا يدل على أن تطبيق القانون لا يزال ضعيفًا فيما يتعلق بالتخريب الذي تعرض .له قوس دوارابالا في قرية تامانان، مقاطعة تولونجاجونج